



BAKESBANGPOL



RENCANA STRATEGIS RENSTRA

2025-2029

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia serta ridlho- Nya, maka Kami dapat melaksanakan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029, Renstra sebagai tindak lanjut dari Renstra Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Pada prinsipnya, keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 dengan sasaran dan indikator serta target yang harus dicapai dalam rentang periode tersebut.

Dengan demikian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan dapat dipergunakan oleh semua unsur di Badan Kesbangpol, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Kesbangpol setiap tahunnya sampai dengan tahun 2029.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025-2029.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Pelaihari, 11 September 2025
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut,



Bambang Kusudarisman, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680818 199010 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	6
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	19
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	22
2.4 Kelompok Sasaran Layananm Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	36
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	36
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37
2.7 Isu Strategis	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
3.1 Tujuan Renstra SKPD	43
3.2 Sasaran Renstra SKPD	45
3.3 Strategi Perangkat Daerah	46
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
4.1 Uraian Program	51
4.2 Uraian Kegiatan	51
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	51
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah	87
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	91

4.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	92
BAB V	PENUTUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
2.1	Kelompok Pegawai berdasarkan Pendidikan	19
2.2	Kelompok Pegawai berdasarkan Pangkat	19
2.3	Kelompok Pegawai berdasarkan Eselon	20
2.4	Kelompok Pegawai berdasarkan Jabatan	20
2.5	Kelompok Pegawai berdasarkan Gender	20
2.6	Kelompok Pegawai berdasarkan Penjenjangan	21
2.7	Proyeksi Kebutuhan Pegawai	21
2.8	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	23
2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	26
2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024	34
2.11	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan	38
3.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025 - 2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47
3.2	Tahapan Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49
3.3	Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	49
4.1	Rencana Program,Kegiatan Dan Sub KegiatanBadan Kesatuan Bangsa Dan Politik	56
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	69
4.3	Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	88
4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah	88
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut disusun berdasarkan Instruksi yang mengamanatkan perlunya Rencana Strategi di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Undang-Undang ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini. Dokumen Renstra disusun guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, difokuskan pada kegiatan yang sifatnya spesifikasi yang bersinergi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Komponen Perencanaan Startegis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi dan strategi utama dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam penyusunan Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Kabupaten Tanah Laut, sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, memiliki posisi yang strategis dan heterogenitas masyarakat yang tinggi. Hal ini menuntut adanya peran aktif Badan Kesbangpol dalam mengoptimalkan fungsi deteksi dini, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan forum-forum masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut merupakan reorganisasi kelembagaan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai akibat berpindahnya fungsi perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan fungsi Penanggulangan Bencana yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, akan tetapi hal tersebut tidak akan mengubah struktur kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat hanya akan mengubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal tersebut didasarkan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No 10 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029

dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta pencapaian visi dan misi Badan Kesbangpol dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menjawab dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, terutama dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat ketahanan nasional, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Tanah Laut.

Penyusunan Renstra ini juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Dengan demikian, Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta menjadi acuan dalam mewujudkan kehidupan sosial politik yang aman, tertib, harmonis, dan demokratis di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum pembuatan rencana strategi adalah mengacu pada :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 10. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tanah Laut 2025-2045.
 11. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 12. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 000.7.3/1/P2EPD/Bapperida Tentang Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA Perangkat Daerah Periode 2025-2029.
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025–2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah tersedianya dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi data masalah daerah, perencanaan arah kebijakan dan pemilihan strategis yang sesuai dengan kebutuhan internal dan juga merupakan penjabaran SKPD terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi pedoman penyusunan Rencana

Kerja Tahunan (RKT) yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pada hakekatnya semua pegawai akan melaksanakan kegiatan yang semaksimal mungkin ketika mampu memahami sesuai yang diharapkan dari organisasi ini.

Perencanaan strategis yang efektif menunjukkan jalan yang harus dilaksanakan oleh semua jajaran yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi, sehingga mampu meminimalisir salah pengertian dan asumsi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan demikian seluruh pelaksana dan manajemen memiliki pandangan yang sama terhadap hasil dan tindakan strategis. Perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut diharapkan mampu menangkap seluruh isu-isu strategis dan dituangkan dalam perencanaan program dan kegiatan, sehingga mampu menyusun perencanaan yang *up to date*.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan rencana strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan pembuatan renstra, serta sistematika penulisan.
- BAB.II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Berisi tentang tugas pokok , fungsi dan Struktur Organisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah SKPD (tingkat capaian kinerja, indikator kinerja) identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, dan penentuan isu-isu strategis yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
- BAB. III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029.
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini memuat uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Selain itu dimuat juga indikator kinerja, target, dan pagu indikatif dari Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mengacu sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.
- BAB V : PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

21 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

a. Tugas Pokok meliputi :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

b. Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas :

1. Mewujudkan kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat yang ada dalam NKRI.
2. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai dengan berfungsinya suprastruktur dan infrastuktur sosial politik, sukses penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat lokal, meningkatnya partisipasi dan etika politik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa.
3. Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib, tentram, aman dan terkendali yang berlandaskan semangat kebersamaan dalam NKRI
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul ditengah – tengah masyarakat.
5. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Meningkatkan Organisasi Masyarakat yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pekerja terhadap bahaya Penyalahgunaan obat terlarang/narkoba.
8. Mewujudkan SDM Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang profesional, bersih dan berwibawa yang didukung sikap mental dan perilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma hukum dan Agama.

c. Fungsinya meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara;
4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, Pengawasan dan fasilitasi di bidang Kewaspadaan Nasional;
5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di bidang Politik Dalam Negeri;
6. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, mengawasi dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan Pengelolaan kegiatan Kesekretariatan;
7. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dibidang penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. Kewenangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum Nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah;
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan Daerah;
3. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah;
4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah;
5. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan

ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah;

6. Pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah;
7. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah;
8. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah;
9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah;
10. Peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Daerah;
11. Pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah;
12. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agamadan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah;

Daerah;

13. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (Koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah;
14. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi emasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah;
15. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Daerah;
16. Pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah;
17. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah;
18. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah;
19. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada

skala Daerah;

20. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Daerah;
21. Pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah;
22. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah;
23. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah;
24. Perekonomian Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Daerah;
25. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas skala Daerah; dan pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, memiliki struktur dipimpin seorang kepala Badan yang dibantu seorang Sekretaris 4 (empat) Kepala Bidang diatur dengan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 118 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Anggaran
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat.
- f. Bidang Politik Dalam Negeri.

Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Gambar 1.1).

Uraian tugas dan fungsi Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Mempunyai tugas merumuskan rencana kegiatan dan program kerja, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
- b) Penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- c) Pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan Perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- e) Pengelolaan urusan umum.

Pada bagian sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Anggaran

Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, melaksanakan pembukuan

keuangan, menyusun laporan keuangan, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
- c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. Menyiapkan bahan penysunan rencana program, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan data laporan pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- b. Penyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
- d. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, barang dan perlengkapan kantor;menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penggunaan dan penghapusan barang serta perlengkapan kantor;
- c. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor serta peralatan dan perlengkapan;
- d. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- e. Mengendalikan arsip aktif;
- f. Melaksanakan administrasi pegawai, barang dan dan perlengkapan kantor;
- g. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD);
- h. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- i. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes,pensiun, taspen dan lain-lain;
- j. Mengelola urusan administrasi perjalanan dinas dankeprotokolan;
- k. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain- lain;
- l. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;

- m. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan SubBagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- o. Pemberikan saran- saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

b. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berubah menjadi Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas : melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketahanan ideology dan wawasan kebangsaan; mengumpulkan data dan menganalisa laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut pembinaan ketahanan ideology dan wawasan kebangsaann; melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan penyelenggaraan bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi, bela Negara dan pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi Lain dalam rangka bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi, bela Negara dan pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- c. Penyusunan program dan kerjasama teknis operasional penyelenggaraan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;

c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;
2. Melaksanakan penyusunan program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama Intelijen Keamanan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik; dan
4. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;
- b) Pelaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi penanganan konflik;

d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;
3. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
- b) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
- c) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja, petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif dan pemberdayaan politik masyarakat serta memfasilitasi pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum;
2. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan pembinaan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan Pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik mempunyai fungsi ;

- a) Penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan pengembangan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum;
- b) Pengkoordinasian dan pengorganisasian kegiatan pembinaan bidang politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- c) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

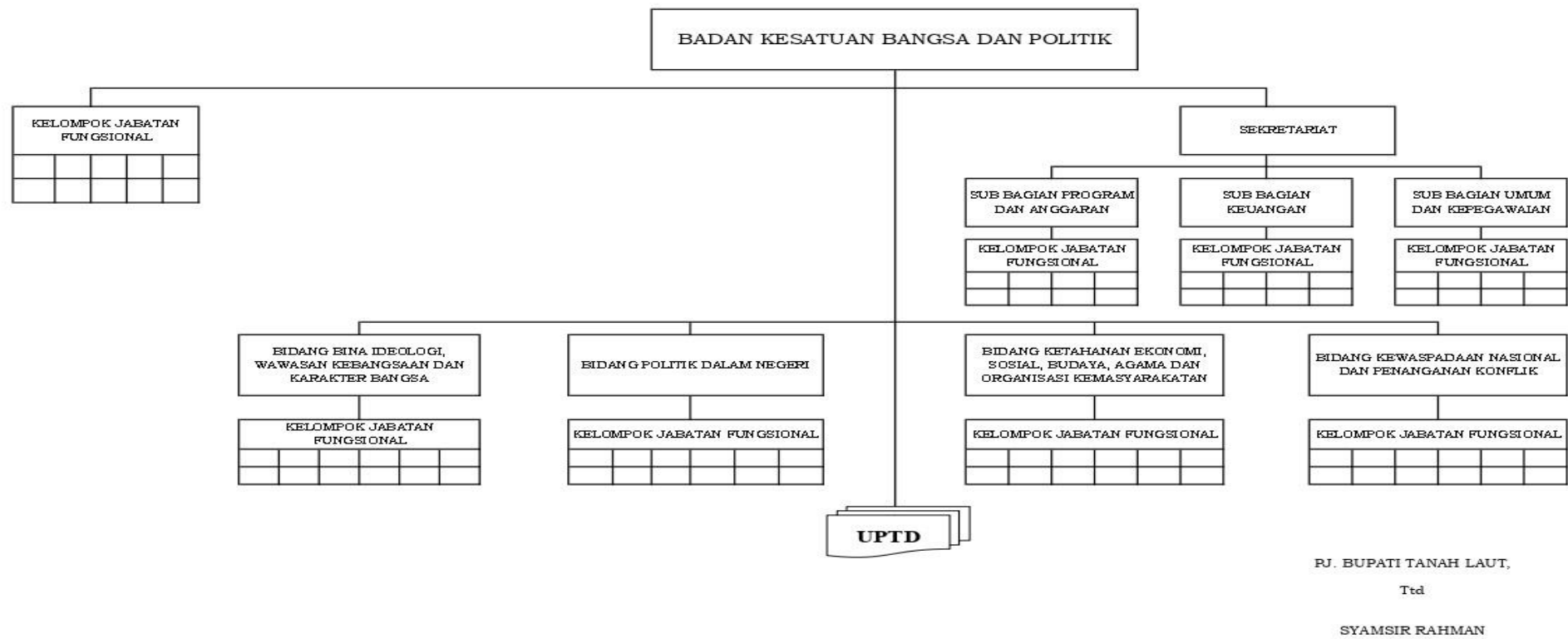
Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- b. Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 118 TAHUN 2023
TANGGAL: 14 Desember 2023



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

22 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Jumlah Pegawai 23 (dua puluh tiga) orang dan Tenaga Kontrak/ PTT sebanyak 6 (enam) orang yang merupakan tenaga honorer sebagai petugas kebersihan kantor dan penjaga keamanan kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga total pegawai berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) orang dengan rincian :

a. Berdasarkan Pendidikan

.1 Kelompok Pegawai berdasarkan Pendidikan

No .	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	S 2	3
2.	S 1	11
3.	D-3	3
4.	D-2	-
3	SMA	4
4	SMP	2
5.	SD	0
J u m l a h		23

Sumber : data bulan Desember 2024

b. Berdasarkan Pangkat / Golongan

Tabel 2.2 Kelompok Pegawai berdasarkan Pangkat

No	PANGKAT/GOL.RUANG	JUMLAH
1.	Golongan IV	
	<i>Pembina Utama Madya (IV/d)</i>	-
	<i>Pembina Utama Muda (IV/c)</i>	-
	<i>Pembina Tingkat I (IV/b)</i>	1
	<i>Pembina (IV/a)</i>	4
2.	Golongan III	
	<i>Penata Tk. I (III/d)</i>	6
	<i>Penata (III/c)</i>	1
	<i>Penata Muda Tk. I (III/b)</i>	1
	<i>Penata Muda (III/a)</i>	3
3.	Golongan II	
	<i>Pengatur Tk. I (II/d)</i>	3
	<i>Pengatur (II/c)</i>	1
	<i>Pengatur Muda Tk. I (II/b)</i>	1
	<i>Pengatur Muda (II/a)</i>	1
4.	Golongan I	-
	<i>Juru Tk. I (I/d)</i>	-
	<i>Juru (I/c)</i>	-
	<i>Juru Muda Tk. I (I/b)</i>	-

	<i>Juru Muda (I/a)</i>	-
5.	PPPK	
	Golongan VII	<i>1</i>
6.	T. Kontrak / Non Golongan	6
	J u m l a h 1 s.d 6	29

Sumber: data bulan Desember 2024

c. Berdasarkan Eselon

Tabel 2.3 Kelompok Pegawai berdasarkan Eselon

No.	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II-b	1
2.	Eselon III-a	-
3.	Eselon III-b	3
4.	Eselon IV-a	-
	J u m l a h	4

Sumber : data bulan Desember 2024

d. Staf Pelaksana

Tabel 2.4 Kelompok Pegawai berdasarkan Jabatan

No.	STAF PELAKSANA	JUMLAH
1.	Staf	19
2.	PTT	6
	J u m l a h	25

Sumber: data bulan Desember 2024

e. Berdasarkan Gender

Tabel 2.5 Kelompok Pegawai berdasarkan Gender

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	P r i a	15
2.	Wanita	14
	J u m l a h	29

Sumber: data bulan Desember 2024

f. Pendidikan Penjenjangan Aparatur

Tabel 2.6 Kelompok Pegawai berdasarkan Penjenjangan

No.	JENIS PENJENJANGAN	JUMLAH
1.	Pim II/ Spamen	-
2.	Pim III	2
3.	Pim IV	-
	J u m l a h	2

Sumber : data bulan Desember 2024

g. Proyeksi Kebutuhan SDM Aparatur

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2019 tentang Informasi Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terjadi kekosongan di beberapa posisi Pejabat Struktural dan Pelaksana pada Badan Kesbangpol, berikut rincian dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun akan datang:

Tabel 2.7 Proyeksi Kebutuhan Pegawai

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun 2025	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEPALA BADAN	1	1						
SEKRETARIAT								
Sekretaris	0	1	1					
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0	1	1					
Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	0	1	1					
Kepala Sub Bagian Keuangan	0	1	1					
Analis Tata Laksana	1	1		1		1		1
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1		1		1		1
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1				1		1
Bendahara	1	1		1				
Pengemudi	1	1			1		1	
Pranata Komputer	2	2		1		2	1	1
Analis Perencanaan	0	1	1	1				
Verifikator Keuangan	0	1	1		1			
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	0	1	1	1		1		1
Pengelola Teknologi Informasi	0	1	1	1				
Pengadministrasi Umum	2	3	1	2		2		1
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK								
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	0	1	1					
Analis Pengaduan Masyarakat	0	1	1	1	1			

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun 2025	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pengadministrasi Umum	0	1	1	1	1		2	
Pengolah Data	1	2	1	1	1			
Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1	1		1	1		1	
Analisis Kebijakan Muda	2	2						
Penata Layanan Operasional	1	1			1	1		1
BIDANG KETAHANAN, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	1	1						
Pengelola Adat dan Kesenian	0	1	1		1		1	
Analisis Ketahanan Seni dan Budaya	0	1	1		1			
Analisis Organisasi Masyarakat	0	1	1		1			
Pengadministrasi Umum	0	1	1		1		2	
Pengolah Data	0	1	1		1		1	
Analisis Kerjasama Kebudayaan	1	1		1		1		1
Penata Layanan Operasional	1	1		1		1		
BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA								
Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1	1						
Analisis Wawasan Kebangsaan	0	1	1	1	1		1	
Pengolah Data	0	2	2		1		1	
Analisis Kerjasama	0	1	1	1	1			
Pengadministrasi Umum	1	2	2	1	1		2	
Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	0	1	1	1	1			1
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI								
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	1	1						
Analisis Partai Politik	1	1		1		1		1
Analisis Kebijakan Muda	1	1			1			
Analisis Impelementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan	0	1	1		1		1	
Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	1	1			1		1	
Pengolah Data	0	1	1			2		
Pengelola Pendidikan	0	1	1		1			
Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1	2	1		1	2		
Penata Layanan Operasional	1	1			1	1		1

Sumber : data Perbup Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2019

23 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Tanah Laut

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Capaian				
1	3	4	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Persentase potensi gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%
2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian		100%	100%	100%		-	100%	82,33%	100%	
		Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%		100%	100%	94,79%	100%	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD	B	B	BB	BB	BB	B	B	BB	B	BB
		Nilai IKM	-	85	86	87	88	-	85,98	87,05	88,31	87,34
3	Melaksanakan Penyusunan dokumen Perencanaan kinerja SKPD	Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
		Dokumen Pelaporan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Pegawai yang dipenuhi gaji dan tunjangannya				100%	100%	-	-	-	92,85%	86,77%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Capaian				
1	3	4	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4	Mengelola Urusan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Aset yang diadakan di lingkungan Bakesbangpol Kab. Tanah Laut	-	100%	-	100%	100%	-	66,67%	-	100%	88,32%
	Menyiapkan data kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian	Dokumentasi Data dan Layanan surat menyurat	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Menginventarisir peningkatan kapasitas SDM	ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	-	-	100%	100%	100%	-	-	20%	100%	0
5	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Wawasan Kebangsaan	100%	100%	-	100%		92,30%	92,30%	-	9,09%	
		Persentase Pelajar yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan					10%					15,39%
6	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	75%	48,47%	100%	>100%	11,08%
7	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	30%	38,10%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	3	4										
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	100%	100%		-	-	80,01	121%	
	Indikator diganti	Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba					75					80,268
8	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pelaihari, 11 September 2025

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut,



Bambang Kusudarisman, S.IP.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680818 199010 1 003

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %	
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS			Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.702.985.601	1.407.916.195	4.477.036.2978	5.884.952.492		87,80%
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.994.835	9.270.579		9.270.579		92,75%
8 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	SILPA	4.995.347	4.554.378	-	4.554.378	100,00%	91,17%
8 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5 Laporan	SILPA	4.999.488	4.716.201	-	4.716.201	100,43%	94,33%
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.027.476.056	4.438.485	4.357.997.388	4.362.435.873		86,77%
8 01 01 2.02 0001	1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 org/ bulan	25 org/bln	PAD, Dana Transfer Umum - DAU- SILPA	5.022.484.112	-	4.357.997.388	4.357.997.388	100,00%	86,77%
8 01 01 2.02 0003	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	SILPA	4.991.944	4.438.485	-	4.438.485	100,00%	88,91%
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					37.746.000	26.400.000		26.400.000		69,94%
8 01 01 2.05 0002	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	61 Paket	42 Paket	SILPA	31.746.000	26.400.000	-	26.400.000	100,00%	83,16%
8 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	-	SILPA	6.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %	
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS			Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					776.661.216	706.973.25		706.973.25		91,03%
8 01 01 2.06 0001	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	SILPA	2.984.466	2.688.708	-	2.688.708	100,00%	90,09%
8 01 01 2.06 0002	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	SILPA	209.052.336	187.928.500		187.928.500	100,00%	89,90%
8 01 01 2.06 0003	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	SILPA	9.994.220	9.003.800	-	9.003.800	100,00%	90,09%
8 01 01 2.06 0005	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	SILPA	22.683.951	18.029.994	-	18.029.994	100,00%	79,48%
8 01 01 2.06 0006	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen/ 12 bahan bacaan	6 bahan bacaan	SILPA	1.320.000	1.320.000	-	1.320.000	100,00%	100,00%
8 01 01 2.06 0007	6 Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket/ Bahan Material yang disediakan	2 Paket	-	SILPA	14.973.380	14.973.380	-	14.973.380	100,00%	100,00%
8 01 01 2.06 0009	7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	48 Laporan	SILPA	515.155.000	472.531.580	-	472.531.580	92,00%	91,73%
8 01 01 2.06 0010	8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	SILPA	497.863	497.863	-	497.863	100,00%	100,00%
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					394.841.006	229.671.900	119.038.909	348.710.809		88,32%
8 01 01 2.07 0005	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yg disediakan	118 Unit	118 Unit	SILPA	118.370.280	104.474.400	-	104.474.400	100,00%	88,26%
8 01 01 2.07 0011	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana prasarana pendukung gedung ktr atau bangunan lainnya	6 Unit	6 Unit	SILPA	276.470.726	125.197.500	119.038.909	244.236.409	100,00%	88,34%

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %	
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS			Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					230.266.488	208.458.947		208.458.947		90,53%
8 01 01 2.08 0002	1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	6 Laporan	SILPA	75.000.000	54.265.736	-	54.265.736	100,00%	72,35%
8 01 01 2.08 0004	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	SILPA	155.266.488	154.193.211	-	154.193.211	100,00%	99,31%
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					226.000.000	222.702.459		222.702.459		98,54
8 01 01 2.09 0001	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit/ 12 bln	1 unit/4 bln	SILPA	35.000.000	34.999.710	-	34.999.710	100,00%	100,00%
8 01 01 2.09 0002	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	7 unit	SILPA	176.000.000	172.909.749	-	172.909.749	100,00%	98,24%
8 01 01 2.09 0006	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	8 Unit	SILPA	15.000.000	14.793.000	-	14.793.000	100,00%	98,62%
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2.348.838.180	2.119.100.200		2.119.100.200		90,22%
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan					2.348.838.180	2.119.100.200		2.119.100.200		90,22%

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %	
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 02 2.01 0003	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	-	SILPA	217.391.188	210.656.500	-	210.656.500	100,00%	96,90%
8 01 02 2.01 0004	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	275 orang	-	SILPA	475.181.663	425.535.100	-	425.535.100	100,00%	89,55%
8 01 02 2.01 0007	3 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	-	SILPA	158.048.338	149.968.000	-	149.968.000	100,00%	94,89%
8 01 02 2.01 0008	4 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	37 Orang	-	SILPA	1.367.615.879	1.209.643.000	-	1.209.643.000	100,00%	88,45%
8 01 02 2.01 0011	5 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	33 Orang	-	SILPA	130.601.112	123.297.600	-	123.297.600	100,00%	94,41%
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					11.584.364.919	328.047.000	11.248.912.000	11.576.959.000		99,94%

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %	
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan
									1		
801032.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					11.584.364.919	328.047.000	11.248.912.000	11.576.959.000		99,94%
801032.010003	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1150 Orang	300 Orang	SILPA	11.474.117.289	219.910.150	11.248.912.000	11.468.822.150	100,00%	99,95%
801032.010004	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	550 Orang	300 Orang	SILPA	82.990.808	81.982.000	-	81.982.000	100,00%	98,78%

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %	
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 03 2.01 0005	3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	-	SILPA	27.256.822	26.154.850		26.154.850	100,00%	95,96%
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					322.499.876	7.995.550	307.500.000	315.495.550		97,83%
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					322.499.876	7.995.550	307.500.000	315.495.550		97,83%
8 01 04 2.01 0003	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 Orang	20 orang	SILPA	322.499.876	7.995.550	307.500.000	315.495.550		97,83%
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.331.703.825	369.712.900	925.526.850	1.295.239.750		97,26%
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					1.331.703.825	369.712.900	925.526.850	1.295.239.750		97,26%

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %	
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS			Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 05 2.01 0003	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1110 Orang	325 Orang	SILPA	1.226.705.851	271.651.700	925.526.850	1.197.178.550	100,00%	97,59%
8 01 05 2.01 0004	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	180 Orang	20 Orang	SILPA	104.997.974	98.061.200	-	98.061.200	100,00%	93,39%
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					931.457.825	827.153.028		827.153.028		88,80%
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					931.457.825	827.153.028		827.153.028		88,80%

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %	
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan
									1		
8 01 06 2.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	-	SILPA	999.788	987.580		987.580	100,00%	98,78%
8 01 06 2.01 0001	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Orang	2 Orang	SILPA	14.710.000	7.520.860	-	7.520.860	100,00%	51,13%
8 01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	-		268.648.598	263.579.136		263.579.136	100,00%	98,11%

NO/ KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR		SUMBER DANA	Dana DPA	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase %	
			TARGET	REALISASI			UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 06 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	1 Laporan	SILPA	22.099.439	14.951.000	-	14.951.000	80,00%	67,65%
8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	4 Dokumen	SILPA	625.000.000	540.114.452	-	540.114.452	90,00%	86,42%
						23.221.850.226	5.059.924.873	16.958.975.147	22.018.900.020		94,82%



Pelaihari, 11 September 2025
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut,

Bambang Kusudarisman, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680818 199010 1 003

Tabel 2.10
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Jenis pelayanan	Obyek pelayanan	Kelompok Sasaran	Mitra PD
1	Mengontrol dan pendeteksian secara dini stabilitas keamanan masyarakat	- Koordinasi bersama intelijen - Kerjasama dengan APH dan pihak lainnya - Fasilitasi rapat intelijen	- Wilayah/tempat adanya potensiATHG - Laporan dari Masyarakat	- APH - KOMINDA
2	Pemberian pembekalan terhadap mayarakat dalam deteksi dini (FKDM)	- Pelatihan - Sosialisasi - Dialog/diskusi	- Masyarakat - Aparatur Kecamatan - Aparatur Kelurahan	- KOMINDA
3	Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	- Fasilitasi dan Pembinaan - Sosialisasi Peraturan tentang Ormas - Monitoring Kegiatan Ormas - Pendataan (SiLAPOR-Ormas) - Hibah - Peningkatan Kapasitas Ormas	- Semua jenis organisasi- organisasi yang ada di masyarakat	- Pemerintah Daerah - Ormas
4	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi aktifitas partai politik	- Pembinaan Partai Politik - Sosialisasi terkait Pelaporan kegiatan dan hibah - Monitoring - Pendataan - Hibah	- Partai politik - Pengurus Partai Politik - Masyarakat	- Partai Politik
5	Meningkatkan pencegahan dan deteksi dini narkoba	- Fasilitasi Deteksi dini narkoba (tes urine) - Koordinasi dengan BNNK dan Kecamatan - Pastisipasi - Sosialisasi P4GNPN	- ASN - Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan	- BNNK - APH - Pemerintah Daerah - Dinas Kesehatan
6	Adanya forum dalam menjaga kerukunan umat beragama	- Koordinasi dan Kerjasama - Fasilitasi/forum	- Tokoh Masyarakat - Tokoh Agama - Lembaga Keagamaan	- FKUB - Kementerian Agama
7	Pengawasan terhadap orang asing/ lembaga asing	- Koordinasi dengan Imigrasi, Perusahaan dan Kecamatan - Kerjasama dengan pihak terkait - Monitoring Orang Asing - Pendataan Orang Asing dan Lembaga Asing	- Orang asing - Lembaga Asing - Kecamatan - Perusahaan	- Kantor Imigrasi
8	Mendukung terlaksananya program prioritas dan tersusunnya progam kerja	- Sarana-prasarana kantor - Pengadaan - Peningkatan kualitas Aparatur	- Aparatur SKPD	
No	Jenis pelayanan	Obyek pelayanan	KelompokSasaran	Mitra PD

9	Rapat-rapat Forkopimda	- Koordinasi - Fasilitasi Rapat - Tindak Lanjut hasil rekomendasi	- Forkopimda	- DPRD - TNI - POLRI - Kejaksaan - Pengadilan Negeri
10	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	- Fasilitasi Paskibraka dan Forum Pembauran Kebangsaan - Koordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) - Kerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	- Pelajar - Masyarakat - FPK	- FPK - TNI - POLRI - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Pembinaan Ketahanan Ekonomi	- Sosialisasi Ketahanan Ekonomi - Koordinasi dengan pihak UMKM - Fasilitasi Rapat	- UMKM - Masyarakat	- Diskumdag

24 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun kelompok sasaran layanan Badan Kesbangpol antara lain:

- a. Perangkat Daerah berjumlah 42
- b. Instansi vertikal berjumlah 10
- c. Lembaga Pendidikan
 - SMA Negeri dan Swasta/Sederajat berjumlah 21
 - SMK Negeri dan Swasta berjumlah 10
- d. Organisasi Kemasyarakatan
- e. UMKM
- f. Partai Politik berjumlah 9
- g. FKDM berjumlah 60

25 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

- Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan layanan dalam bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik , yaitu
1. Aparat Penegak hukum baik Kepolisian RI dan Kejaksaan Negeri RI., dalam rangka pelayanan mengontrol dan pendeteksian secara dini stabilitas keamanan masyarakat.

2. Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dalam rangka Pemberian pembekalan mendeteksi, mengantisipasi, dan melaporkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat, baik yang berasal dari faktor alam maupun manusia (FKDM).
3. Partai Politik dalam hal mengkoordinasikan dan memfasilitasi aktifitas partai politik dari Pembinaan ,Sosialisasi Monitoring dan hibah
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, BNNK, APH dalam rangka Meningkatkan pencegahan dan deteksi dini narkoba
5. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjaga kerukunan umat beragama
6. Kantor Imigrasi RI., dalam rangka Pengawasan terhadap orang asing/ lembaga asing
7. Rapat Rapat Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang beranggotakan Kepala Daerah, Ketua DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi Negeri dan Pengadilan Negeri
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam rangka pembinaan dan Sosialisasi Ketahanan Ekonomi.

26 **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Karakteristik penduduk Kabupaten Tanah Laut yang heterogen terdiri dari pendatang dan penduduk asli setempat memberikan warna tersendiri dengan membawa berbagai macam kebudayaan yang berkembang dan adat istiadat setempat. Karena perkembangan dari kegiatan ekonomi dan penduduk, terjadilah proses asimilasi yang berasal dari penduduk setempat. Secara umum adat istiadat yang dipegang sudah mulai longgar akibat terjadinya pergeseran dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan.

Budaya daerah sesungguhnya mempunyai nilai luhur dan nilai historis yang terus harus dipertahankan dan dikembangkan untuk mendasar citra diri bangsa dan daerah. Ketahanan budaya daerah dapat ditingkatkan maka diperlukan pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap budaya masyarakat lainnya. Karena kurangnya pemahaman terhadap budaya masyarakat lainnya bisa menimbulkan benturan baik secara sosial atau bahkan secara fisik.

Untuk mengantisipasi rencana aksi terhadap integritas nasional yang semakin terasa saat dan tegaknya kedaulatan NKRI harus dilakukan kewaspadaan dan deteksi dini serta koordinasi yang baik antar aparat unsur intelejen secara nasional.

Pembinaan yang maksimal dalam rangka untuk memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana baik bencana perang, bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri (konflik sosial). Maupun bencana perang terselubung (Proxy war). Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah perlu didukung juga dengan koordinasi yang baik antar aparat secara profesional, misalnya dengan aparat intelejen daerah agar informasi tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat dapat diketahui secara akurat sehingga dapat diatasi secara tepat dan cepat agar permasalahan yang terjadi tidak berkembang secara masal.

Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut untuk dapat mengarahkan peningkatan potensi aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan terhindar dari kekacauan (*chaos*).

Peningkatan peran masyarakat ini tentu dalam iklim demokrasi adalah sebuah kesuksesan

namun tanpa dibarengi dengan aturan hukum (rule of law) yang jelas, tegas dan dibarengidengan kesadaran yang tinggi akan menimbulkan berbagai problema baru dan mungkin akan berakhir pada kategori daerah tidak kondusif. Hal ini menjadi bahan dalam perencanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dapat terus memonitoring dan mengarahkan potensi yang baik ini demi terwujudnya kelangsungan Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

a. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pentingnya pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat untuk menciptakan generasi muda yang cinta tanah air dan memahami pentingnya persatuan.

b. Bidang Politik Dalam Negeri.

Pendidikan politik di masyarakat sangat penting dalam menjaga dan memperkuat ruang bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses politik, serta meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik yang lebih transparan. Menjaga kualitas demokrasi melalui pemilu yang bebas, adil, dan transparan. Isu terkait manipulasi politik, politik uang, serta rendahnya partisipasi politik masyarakat perlu diatasi untuk memperkuat sistem demokrasi.

c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Adanya penyimpangan perubahan ekonomi seperti inflasi, adanya konflik antar atau inter umat beragama seperti pendirian tempat ibadah dan aliran yang menyimpang, warisan budaya yang terancam punah, serta kurangnya peran Organisasi Kemasyarakatan memerlukan perhatian pemerintah dan kerjasama masyarakat dalam mencegahnya.

d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Berpijak pada ketiga gejala di atas tentunya akan mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ipoleksosbud) akan semakin naik baik kuantitas maupun kualitasnya. Identifikasi permasalahan dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan

NO.	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Rendahnya akuntabilitas pada Badan Kesbangpol	Masih adanya kasus/temuan akuntabilitas pada Badan Kesbangpol	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
			Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			Belum optimalnya peningkatan disiplin aparatur

NO.	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
			Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			Belum optimalnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
			Belum terpenuhinya jumlah SDM
2	Legalitas Organisasi Kemasyarakatan belum terpenuhi	Belum seluruhnya Organisasi Masyarakat mendaftarkan serta melaporkan keberdadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Masih kurangnya pemahaman organisasi terhadap aturan tentang Organisasi Kemasyarakatan
3	Masih tingginya penyalahgunaan Narkoba;	Rendahnya pengetahuan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba	Masyarakat enggan melaporkan dalam hal adanya indikasi penyalahgunaan narkoba
			Belum adanya Materi mengenai bahaya Narkoba yang disisipkan ke dalam mata pelajaran
4	Belum terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan	Masih adanya perilaku masyarakat yang intoleran	Pelaksanaan bela negara belum optimal;
			Belum optimalnya pembauran kebangsaan
5	Menurunnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.	Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila di masyarakat	Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa khususnya di kalangan generasi muda
		Rendahnya pemahaman tujuan pencapaian 4 konsensus dasar di kalangan Generasi Muda/Pelajar Rendahnya pemahaman masyarakat terkait aturan tentang pendirian rumah ibadah	Belum maksimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 4 Konsensus Dasar Terdapat gejala intoleran antar umat beragama dan intern umat beragama
6	Sinergitas Koordinasi Kewaspadaan Dini Daerah belum maksimal	Belum maksimalnya fungsi Kewaspadaan Dini Daerah	Rendahnya pemahaman Kewaspadaan Dini Daerah
			Pemahaman kewaspadaan dini di level masyarakat belum terbangun dengan baik
7	Menurunnya Partisipasi Politik Masyarakat	Belum optimalnya sosialisasi, desiminasi terkait dengan Pendidikan Politik	Minimnya media/forum untuk pendidikan politik
8	Belum terselesaikannya masalah kerawanan sosial	Masih adanya kasus kerawanan sosial yang disebabkan oleh ekonomi dan budaya	Adanya kasus sengketa batas lahan
			Adanya konflik yang disebabkan perbedaan budaya antara warga asli dan warga pendatang

27 Isu Strategis

isu strategis memperhatikan beberapa hal diantaranya:

1. Isu Strategis Rancangan RPJMN 2025-2029 untuk Kalimantan, yaitu:
 - Pertambangan dan perkebunan kelapa sawit masih memiliki peran sangat besar di sektor hulu, sementara proses hilirisasi industri berjalan lambat.
 - Peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan talenta tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
 - Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) disertai rendahnya Rasio Kapasitas Fiskal Daerah, Pembangunan di wilayah tertinggal dan perbatasan belum optimal, dengan konektivitas dan infrastruktur dasar yang terbatas.
2. Isu Strategis Rantek RPJMD Kalimantan Selatan 2025-2029
 - a. Pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal
 - b. Kehidupan sosial masyarakat serta budaya lokal sebagai modal sosial perlu diperkuat dan dilestarikan
 - c. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)
 - d. Pengembangan ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sementara sektor lainnya belum dikembangkan secara optimal
 - e. Hilirisasi industri dan industri non ekstraktif belum dikembangkan sebagai sektor unggul di masa datang, terutama untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai bagian dari superhub ekonomi Nusantara
 - f. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam potensial yang berkelanjutan dan terintegrasi antarwilayah kabupaten/kota
 - g. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi
 - h. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan di berbagai sektor

- i. Belum optimalnya pembangunan yang memerhatikan kelestarian lingkungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan resilien terhadap bencana
- j. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi yang diharapkan maka untuk menentukan penentuan isu-isu startegis oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut menggunakan analisis sebagai upaya dalam menentukan dan mengembangkan faktor-faktor mana yang menjadi peluang-tantangan atau faktor kekuatan-kelemahan untuk mengatasi kendala yang ada dalam pencapaian target sasaran untuk meningkatkan pencapaian tujuan dengan penentuan isu- isu strategis yang ingin dikembangkan adalah :

1. Radikalisasi dan Terorisme

Mencegah penyebaran ideologi radikal dan terorisme menjadi isu penting, mengingat tantangan terhadap ideologi negara dan upaya memecah belah kesatuan bangsa. Oleh karena itu penting bagi Badan Kesbangpol bersinergi bersama instansi vertikal dalam menjaring informasi intelijen untuk mencegah potensi radikalisme dan terorisme di masyarakat. Sinergitas Forkopimda juga sangat penting dalam menjaga stabilitas serta menciptakan situasi yang aman dalam mencegah radikalisme dan terorisme

2. Tantangan Multikulturalisme

Tanah Laut umumnya merupakan kabupaten dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya. Isu terkait dengan toleransi antar kelompok dan menjaga kerukunan sosial menjadi sangat strategis dalam menjaga kesatuan bangsa. Pemahaman tentang ideologi Pancasila dan 4 pilar sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Polarisasi Sosial dan Politik

Perbedaan pandangan politik yang semakin tajam di masyarakat dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Isu ini penting untuk dikelola agar tidak berkembang menjadi konflik yang merusak kesatuan bangsa di Tanah Laut. Pentingnya Pendidikan Politik di masyarakat sangat penting untuk menciptakan warga negara yang sadar, kritis, dan aktif dalam proses politik.

4. Pengaruh Global dan Transnasional

Globalisasi dan interaksi internasional membawa pengaruh besar terhadap politik dalam negeri. Pengaruh luar seperti aliran ideologi asing, organisasi internasional, atau tekanan global harus dihadapi dengan bijaksana. Rendahnya apresiasi dan minat generasi muda terhadap seni budaya lokal, berbanding terbalik dengan maraknya budaya asing.

5. Penguatan Demokrasi

Peningkatan kualitas demokrasi tetap menjadi isu strategis dalam memastikan partisipasi politik yang luas, adil, dan transparan. Penguatan partisipasi politik melalui pendidikan politik yang lebih baik dan dorongan untuk lebih aktif dalam pemilu sangat penting agar demokrasi bisa berfungsi secara maksimal.

6. Penanganan Konflik

Konflik yang muncul terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti sengketa lahan dan kerusakan lingkungan, dapat mempengaruhi stabilitas politik dan social di masyarakat.

7. Pemilu dan Integritas Sistem Politik

Menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan umum (pemilu) sangat penting untuk memastikan adanya pemerintahan yang sah dan diterima oleh masyarakat.

8. Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik, demokrasi, dan hak kewarganegaraan untuk memperkuat partisipasi politik yang sehat dan konstruktif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra SKPD

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut 2025-2029 yang diintegrasikan dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 mengadopsi struktur Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045, yang terdiri dari

- 1) Transformasi Sosial;
- 2) Transformasi Ekonomi;
- 3) Transformasi Tata Kelola;
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia; serta
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6) Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- 7) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- 8) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Berikut ada Visi dan Misi Presiden beserta penjabarannya ke dalam Prioritas Nasional 2025-2029:



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

VISI-MISI PRESIDEN RI 2024-2029

Berdasarkan Suara Terbanyak

VISI : BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur



CALON PRESIDEN
H. PRABOWO SUBIANTO

CALON WAKIL PRESIDEN
GIBRAN RAKABUMING
RAKA

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025-2029



Sedangkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih adalah sebagai berikut:

KALSEL BEKERJA

MISI 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA Pembangunan sumber daya manusia (SDM) selain difokuskan pada penguatan pendidikan dan kesehatan, juga diarahkan pada aspek spiritual dan nilai-nilai hidup yang luhur, berbudaya, dan berakhlak mulia.
MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL Pembangunan di berbagai sektor didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendorong perekonomian daerah serta posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik. Penyediaan sarana dan prasarana diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah serta tekoneksi dengan wilayah lain.
MISI 3: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, MERATA, DAN SYARIAH Perekonomian daerah dikembangkan dengan mengelola sumber daya alam didukung dengan sumber daya manusia yang unggul, dan infrastruktur yang handal. Penerapan inovasi serta teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan ekonomi global. Posisi strategis Kalimantan Selatan yang berdampingan dengan IKN menjadi peluang untuk mewujudkan gerbang logistik yang maju dan unggul.
MISI 4: PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM Pembangunan daerah dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, sehingga akan memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana. Sumber daya alam dan potensi wilayah dikelola secara berimbang sehingga selain bermanfaat untuk peningkatan perekonomian daerah, juga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup..
MISI 5: TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengedepankan prinsip profesional, bersih, dan melayani serta berbasis digital. Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan menjadi komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus daya tarik bagi peningkatan investasi daerah.

PENYELARASAN MISI RPJMD KALSEL DENGAN MISI RPJMN 2025- 2029



Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dilakukan melalui diskusi intern serta memanfaatkan informasi yang berkembang. Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renstra secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai Tujuan, Kebijakan, dan Program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional.

3.2 Sasaran Renstra SKPD

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didasarkan pada Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2025-2029 yaitu:

1. Visi

BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN

2. Misi

- a. Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai agama
- b. Membangun Ekonomi yang inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas
- c. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan dinamis

Berdasarkan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029, tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Misi 3 yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis dengan mengampu tujuan sesuai INMEN No.2 Tahun 2025 yaitu Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis dan Bertoleransi yang Berlandaskan Pancasila.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

a. Tujuan :

- 1. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis dan Bertoleransi yang Berlandaskan Pancasila

b. Sasaran

- 1. Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah

dalam mencapai visi dan misi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk periode 2025-2029 adalah disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025 - 2029
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					Realisasi 2024	Proyeksi 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis dan Bertoleransi yang Berlandaskan Pancasila	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Nilai	-	6,71	6,72	6,75	6,77	6,80	6,80
		Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat	Persentase gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dilakukan melalui diskusi intern serta memanfaatkan informasi yang berkembang. Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renstra secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional.

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut.

1. Rantek RPJMN Tahun 2025-2029;
2. Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029
3. RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
4. Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan strategis. Strategi adalah langkah langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 3.2
TAHAPAN STRATEGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Identifikasi Potensi Konflik dan Penguatan Wawasan Kebangsaan	Konsolidasi Program Pencegahan Konflik dan Radikalisme	Penguatan Jejaring dan Partisipasi Masyarakat	Evaluasi dan Replikasi Inovasi Program Unggulan	Pemantapan Keberlanjutan dan Transformasi Digital

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada badan kesatuan bangsa dan Politik agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan Pembangunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 3.3
Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan dinamis	Peningkatan Penerapan Good Governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Pemenuhan kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang mendukung peningkatan nilai AKIP	
		Menciptkan kualitas perencanaan, pelaporan, pemenuhan saran dan prasarana kantor	
		Menciptakan stabilitas kehidupan bermasyarakat	

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antarinstansi Pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui Forkopimda	
		Menciptakan stabilitas kehidupan bermasyarakat,	
		Menumbuhkembangkan kehidupan politik dan kemasyarakatan yang demokratis di Kabupaten Tanah Laut	
		Melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan, pelaksanaan upacara wawasan kebangsaan, memperkuat Forum Pembauran Kebangsaan, kegiatan lomba-lomba bertemakan wawasan kebangsaan dan penguatan karakter, serta fasilitasi Paskibraka	
		Melaksanakan Sosialisasi tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu pada masing-masing bidang untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Dalam mendukung terwujudnya visi dan misi dengan pelaksanaan strategi dan mengikuti arah kebijakan sebagai pedoman, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut melakukan perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdiri dari **6 (Enam) Program** dan **12 (dua belas) kegiatan** dan **60 (enam puluh) Subkegiatan**.

4.1 Uraian Program

Program yang diselenggarakan untuk Tahun 2025-2029 antara lain

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial,
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik,
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kabangsaan,

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk Tahun 2025- 2029 antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
11. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Subkegiatan yang diselenggarakan untuk Tahun 2025- 2029 antara lain:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Pengadaan Pakain dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Bahan/ Material
13. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16. Pengadaan Mebel
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

21. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25. Pemeliharaan Mebel
26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
31. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
32. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
33. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
34. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
35. Pelaksanaan Koordinasi Forum Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut
36. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah

37. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
38. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum ,Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
39. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
40. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
41. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
42. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
43. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
44. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
45. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
46. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
47. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat

Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

48. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
49. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
50. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
51. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
52. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
53. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
54. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
55. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
56. Pembentukan Paskibraka
57. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
58. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
59. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
60. Pelaksanaan tugas Paskibraka

TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
- Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis dan Bertoleransi yang Berlandaskan Pancasila				Indeks Harmoni Indonesia ()		
		Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat			Persentase Gangguan/Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Terselesaikan (%)		
			Meningkatnya Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		Persentase partisipasi pelajar dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara dan pengembangan wawasan kebangsaan (%)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
					Indeks Ketahanan Diri Remaja (Nilai)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan pada pelajar		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
				Meningkatnya Pembinaan Pencegahan Narkoba	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta	

						Pancasila	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (5 tahun) (%)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
					Persentase Partai Politik yang aktif berkontribusi dalam pendidikan politik (%)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Meningkatnya Aktivitas Partai Politik dalam Pendidikan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya desa peduli pemilu dan pemilihan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pendidikan politik pemilih pemula	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan daerah			Persentase Ormas yang berkontribusi dalam Pembangunan Daerah (%)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan ormas	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

				Meningkatnya legalitas organisasi masyarakat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
--	--	--	--	--	--	---	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, agama dan budaya		Persentase hasil rekomendasi koordinasi penanganan konflik umat beragama oleh FKUB yang ditindaklanjuti (%)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
					Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi (%)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Menciptakan kerukunan Umat Beragama	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
--	--	--	--	--	---	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
--	--	--	--	--	---	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pembinaan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial, budaya, agama dan ekonomi		Persentase potensi konflik sosial, budaya, agama dan ekonomi yang tertangani sesuai standar (%)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Meningkatnya kewaspadaan dini daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
--	--	--	--	--	---	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
				Meningkatnya tindaklanjut hasil rekomendasi koordinasi forkompimda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

TABEL 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				12.281.063.717,39		13.281.970.410,35		13.675.271.475,89		91.646.472.855,28		14.000.000.000		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.995.589.136		6.773.423.080,99		6.904.157.311,8		7.544.166.573,67		7.078.535.553		
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77	80,01	5.995.589.136	80,02	6.773.423.080,99	80,05	6.904.157.311,8	80,07	7.544.166.573,67	80,25	7.078.535.553	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.681.590		3.865.669,5		3.904.326,19		10.943.370,2		9.804.063,75		
Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	3	3.681.590	3	3.865.669,5	3	3.904.326,19	3	10.943.370,2	3	9.804.063,75		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	6		6		6		6		7			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.913.365		2.009.033,25		2.029.123,58		5.049.415,56		4.159.703,89		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	6	1.913.365	6	2.009.033,25	6	2.029.123,58	6	5.049.415,56	7	4.159.703,89		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.768.225		1.856.636,25		1.875.202,61		5.893.954,64		5.644.359,86		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	3	1.768.225	3	1.856.636,25	3	1.875.202,61	3	5.893.954,64	3	5.644.359,86		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.090.549.223		5.345.076.684,15		5.398.527.450,99		5.454.512.725,5		5.510.172.632,51		
Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	5	5.090.549.223	5	5.345.076.684,15	5	5.398.527.450,99	5	5.454.512.725,5	5	5.510.172.632,51		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	29		29		29		29		29			
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.087.049.223		5.341.401.684,15		5.394.815.700,99		5.448.763.858		5.502.712.015,01		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	29	5.087.049.223	29	5.341.401.684,15	29	5.394.815.700,99	29	5.448.763.858	29	5.502.712.015,01		
8.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000		3.675.000		3.711.750		5.748.867,5		7.460.617,5		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	5	3.500.000	5	3.675.000	5	3.711.750	5	5.748.867,5	5	7.460.617,5		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		40.000.000		40.400.000		40.804.000		40.804.000		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			0		40.000.000		40.400.000		40.804.000		40.804.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	57	0		40		40		40		40			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		40.000.000		40.400.000		40.804.000		40.804.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	57	0	0	40	40.000.000	40	40.400.000	40	40.804.000	40	40.804.000		
8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			0		0		0		0		0		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				506.298.734,33		564.113.671,25		608.754.807,96		1.086.810.044,78		654.009.275,16		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2	506.298.734,33	2	564.113.671,25	2	608.754.807,96	2	1.086.810.044,78	2	654.009.275,16		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	0		0		0		0		0			0
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.993.432,68		5.243.104,31		5.295.535,36		10.348.490,71		5.348.490,71		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.993.432,68	2	5.243.104,31	2	5.295.535,36	2	10.348.490,71	2	5.348.490,71		
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				105.592.418		110.872.039,1		150.980.759,49		202.490.567,08		158.529.797,46		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8	105.592.418	7	110.872.039,1	7	150.980.759,49	7	202.490.567,08	7	158.529.797,46		
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.995.457,15		10.495.230,01		10.600.182,31		10.706.184,13		10.706.184,13		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	9.995.457,15	2	10.495.230,01	2	10.600.182,31	2	10.706.184,13	2	10.706.184,13		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.999.706,5		16.799.691,83		16.967.688,74		34.105.054,37		34.105.054,37		

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2	15.999.706,5	2	16.799.691,83	2	16.967.688,74	2	34.105.054,37	2	34.105.054,37		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				16.992.720		17.842.356		18.020.779,56		18.200.987,36		18.200.987,36		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2	16.992.720	2	17.842.356	2	18.020.779,56	2	18.200.987,36	2	18.200.987,36		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		400.000.000		404.000.000		808.040.000		424.200.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	350.000.000	12	400.000.000	12	404.000.000	12	808.040.000	12	424.200.000		
8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.725.000		2.861.250		2.889.862,5		2.918.761,13		2.918.761,13		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	1	2.725.000	1	2.861.250	1	2.889.862,5	1	2.918.761,13	1	2.918.761,13		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.039.588,67		36.791.568,1		57.159.483,78		362.756.078,62		57.731.078,62		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	118	9	35.039.588,67	6	36.791.568,1	6	57.159.483,78	6	362.756.078,62	6	57.731.078,62		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		2		0			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		50.000.000		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	2	50.000.000	0	0		
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				35.039.588,67		36.791.568,1		57.159.483,78		57.731.078,62		57.731.078,62		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	118	9	35.039.588,67	6	36.791.568,1	6	57.159.483,78	6	57.731.078,62	6	57.731.078,62		

8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
8.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		255.025.000		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	255.025.000	0	0		
8.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.000.000		234.304.488		236.647.533		239.014.008,21		239.014.008,21		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	75.000.000	12	234.304.488	12	236.647.533	12	239.014.008,21	12	239.014.008,21		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12				12				12			
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.000.000		78.750.000		79.537.500		80.332.875		80.332.875		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	75.000.000	12	78.750.000	12	79.537.500	12	80.332.875	12	80.332.875		
8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0		0		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		155.554.488		157.110.033		158.681.133,21		158.681.133,21		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	0	12	155.554.488	12	157.110.033	12	158.681.133,21	12	158.681.133,21		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				285.020.000		549.270.999,99		558.763.709,88		349.326.346,36		567.000.494,75		

Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	285.020.000	1	549.270.999,99	1	558.763.709,88	1	349.326.346,36	1	567.000.494,75		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		2		2							
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	19		19		19		19		19			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	21		20		20		20		20			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1				2					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			38.990.000		40.939.500		41.348.895		41.762.383,95		41.762.383,95		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	38.990.000	1	40.939.500	1	41.348.895	1	41.762.383,95	1	41.762.383,95		
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				232.280.000		243.894.000		246.332.940		288.796.269,41		251.259.598,8		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	19	232.280.000	19	243.894.000	19	246.332.940	19	288.796.269,41	19	251.259.598,8		
8.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.750.000		14.437.500		18.581.875		18.767.693		18.953.512		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	21	13.750.000	20	14.437.500	20	18.581.875	20	18.767.693	20	18.953.512		
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		249.999.999,99		200.609.478		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	2	249.999.999,99	2	200.609.478		0		0		

8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		51.890.521,88		0		255.025.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0	1	51.890.521,88		0	2	255.025.000		
8.01.01.2.09.0011 -Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.441.998.166		1.661.674.429,55		1.805.772.535,29		2.173.830.260,64		1.866.503.272,59		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase partisipasi pelajar dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara dan pengembangan wawasan kebangsaan (%)	15,39	20	1.441.998.166	22	1.661.674.429,55	23	1.805.772.535,29	25	2.173.830.260,64	25	1.866.503.272,59	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Indeks Ketahanan Diri Remaja (Nilai)	50	51		51,5		52		52,5		53			
	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1.441.998.166		1.661.674.429,55		1.805.772.535,29		2.173.830.260,64		1.866.503.272,59		
Meningkatnya pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan pada pelajar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1.200	1.200	1.249.998.908,8	1.200	1.460.075.209,49	1.200	1.602.157.323,04	1.200	1.968.178.896,27	1.200	1.659.685.365,62		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)													
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)													

	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	350	280		210		210		210		210			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)													
	Jumlah Paskibraka (Orang)	33	45		45		45		45		45			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				99.999,545		104.999.522,25		106.049.517,47		107.110.012,65		109.231.003		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1.200	1.200	99.999.545	1.200	104.999.522,25	1.200	106.049.517,47	1.200	107.110.012,65	1.200	109.231.003		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				49.999.530		52.499.506,5		53.024.501,57		103.554.746,58		54.615.236,61		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	350	280	49.999.530	210	52.499.506,5	210	53.024.501,57	210	103.554.746,58	210	54.615.236,61		
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)			0		0		0		0		0		
8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)			0		0		0		0		0		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				1.099.999.833,8		1.302.576.180,74		1.443.083.304		1.757.514.137,04		1.495.839.126,01		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	33	45	1.099.999.833,8	45	1.302.576.180,74	45	1.443.083.304	45	1.757.514.137,04	45	1.495.839.126,01		
Meningkatnya Pembinaan Pencegahan Narkoba	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	33	45	191.999.257,2	45	201.599.220,06	45	203.615.212,25	45	205.651.364,37	45	206.817.906,97		

	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)													
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)													
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				109.999.302,2		115.499.267,06		116.654.260,25		118.690.412,37		118.987.344,97		
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1	1	109.999.302,2	1	115.499.267,06	1	116.654.260,25	1	118.690.412,37	1	118.987.344,97		
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)			0		0		0		0		0		
8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				0		0		0		0		0		
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)			0		0		0		0		0		
8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				81.999.955		86.099.953		86.960.952		86.960.952		87.830.562		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	33	45	81.999.955	45	86.099.953	45	86.960.952	45	86.960.952	45	87.830.562		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				2.358.444.593,39		2.394.589.486,71		2.438.535.381,57		79.056.401.711,27		2.487.903.784,3		
Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (5 tahun) (%)	77,6	0	2.358.444.593,39	0	2.394.589.486,71	0	2.438.535.381,57	78	79.056.401.711,27	0	2.487.903.784,3	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Persentase Partai Politik yang aktif berkontribusi dalam pendidikan politik (%)	100	100				100		100					
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				2.358.444.593,39		2.394.589.486,71		2.438.535.381,57		79.056.401.711,27		2.487.903.784,3		

Meningkatnya Aktivitas Partai Politik dalam Pendidikan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	1.150	600	2.316.445.338	625	2.332.267.604,85	625	2.355.590.280,9	625	78.882.627.159,59	625	2.402.702.086,51		
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2.316.445.338		2.332.267.604,85		2.355.590.280,9		78.882.627.159,59		2.402.702.086,51		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	1.150	600	2.316.445.338	625	2.332.267.604,85	625	2.355.590.280,9	625	78.882.627.159,59	625	2.402.702.086,51		
Meningkatnya desa peduli pemilu dan pemilihan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)			11.999.621,93		14.999.999,99		15.149.999,99		55.301.500		16.210.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0		0		0		0		0		

Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				11.999.621,93		14.999.999,99		15.149.999,99		55.301.500		16.210.500		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2	2	11.999.621,93	2	14.999.999,99	2	15.149.999,99	2	55.301.500	2	16.210.500		
Meningkatnya pendidikan politik pemilih pemula	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	541	200	29.999.633,46	200	47.321.881,87	200	67.795.100,68	200	118.473.051,68	200	68.991.197,79		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	0		2		2		2		2			
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0		15.822.266,9		15.980.489,57		16.140.294,46		16.140.294,46		

Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	2	15.822.266,9	2	15.980.489,57	2	16.140.294,46	2	16.140.294,46		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				29.999.633,46		31.499.614,97		51.814.611,11		102.332.757,22		52.850.903,33		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	541	200	29.999.633,46	200	31.499.614,97	200	51.814.611,11	200	102.332.757,22	200	52.850.903,33		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				528.202.610		554.612.740,5		560.158.867,9		665.760.456,58		571.362.045,26		
Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan daerah	Persentase Ormas yang berkontribusi dalam Pembangunan Daerah (%)	25	25,1	528.202.610	25,1	554.612.740,5	26	560.158.867,9	26	665.760.456,58	27	571.362.045,26	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				528.202.610		554.612.740,5		560.158.867,9		665.760.456,58		571.362.045,26		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan ormas	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)													

	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)													
8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)			0		0		0		0		0		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya legalitas organisasi masyarakat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)			528.202.610		554.612.740,5		560.158.867,9		665.760.456,58		571.362.045,26		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	150	150		150		150		150		150			

8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				528.202.610		554.612.740,5		560.158.867,9		665.760.456,58		571.362.045,26		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	150	150	528.202.610	150	554.612.740,5	150	560.158.867,9	150	665.760.456,58	150	571.362.045,26		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				281.829.600		308.921.080		334.010.290,8		457.350.393,71		340.484.024,65		
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, agama dan budaya	Persentase hasil rekomendasi koordinasi penanganan konflik umat beragama oleh FKUB yang ditindaklanjuti (%)	100	100	281.829.600	100	308.921.080	100	334.010.290,8	100	457.350.393,71	100	340.484.024,65	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi (%)	20	26		26,5		27		27,5		28			
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				281.829.600		308.921.080		334.010.290,8		457.350.393,71		340.484.024,65		
Menciptakan kerukunan Umat Beragama	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)			264.246.200		290.458.510		313.363.095,1		416.496.726,06		319.630.357		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1.110	1.500		1.250		1.500		1.500		1.500			

	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)													
8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				264.246.200		290.458.510		313.363.095,1		416.496.726,06		319.630.357		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1.110	1.500	264.246.200	1.250	290.458.510	1.500	313.363.095,1	1.500	416.496.726,06	1.500	319.630.357		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)			0		0		0		0		0		
Meningkatnya pembinaan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	180	200	17.583.400	200	18.462.570	200	20.647.195,7	200	40.853.667,65	200	20.853.667,65		
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				17.583.400		18.462.570		20.647.195,7		40.853.667,65		20.853.667,65		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	180	200	17.583.400	200	18.462.570	200	20.647.195,7	200	40.853.667,65	200	20.853.667,65		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.674.999.612		1.588.749.592,6		1.632.637.088,53		1.748.963.459,41		1.655.211.320,2		
Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial, budaya, agama dan ekonomi	Persentase potensi konflik sosial, budaya, agama dan ekonomi yang tertangani sesuai standar (%)	100	100	1.674.999.612	100	1.588.749.592,6	100	1.632.637.088,53	100	1.748.963.459,41	100	1.655.211.320,2	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				1.674.999.612		1.588.749.592,6		1.632.637.088,53		1.748.963.459,41		1.655.211.320,2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kewaspadaan dini daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	520	520	274.999.612	520	288.749.592,6	520	294.637.088,53	520	297.583.459,41	520	303.831.320,2		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	4	6		6		6		6					
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	10		10		10		10					
8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10.000.000		10.500.000		10.605.000		10.711.050		10.711.050		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	10	10.000.000	10	10.500.000	10	10.605.000	10	10.711.050	10	10.711.050		
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				249.999.800		262.499.790,6		265.124.788,53		267.776.036,41		273.078.532,2		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	520	520	249.999.800	520	262.499.790,6	520	265.124.788,53	520	267.776.036,41	520	273.078.532,2		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				14.999.812		15.749.802		18.907.300		19.096.373		20.041.738		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	4	6	14.999.812	6	15.749.802	6	18.907.300	6	19.096.373	6	20.041.738		
Meningkatnya peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)			0		0	3	25.000.000	3	25.250.000	3	25.250.000		
	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)													
8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0		0		25.000.000		25.250.000		25.250.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)			0		0	3	25.000.000	3	25.250.000	3	25.250.000		
Meningkatnya tindaklanjut hasil rekomendasi koordinasi forkompinda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12	1.400.000.000	12	1.300.000.000	12	1.313.000.000	12	1.426.130.000	12	1.326.130.000		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1.400.000.000		1.300.000.000		1.313.000.000		1.426.130.000		1.326.130.000		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12	1.400.000.000	12	1.300.000.000	12	1.313.000.000	12	1.426.130.000	12	1.326.130.000		

Pelaihari, 11 September 2025

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut,



Danang Kusudarisman, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680818 199010 1 003

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut menyusun sub kegiatan yang diarahkan pada penguatan ketahanan bangsa, stabilitas politik, serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Sub kegiatan yang dilaksanakan mencakup upaya fasilitasi, pembinaan, koordinasi, serta pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pendidikan politik, penanganan konflik sosial, penguatan wawasan kebangsaan, dan kerukunan antar umat beragama.

Selain itu, Bakesbangpol juga mengembangkan sub kegiatan untuk membina organisasi kemasyarakatan dan partai politik agar berperan lebih aktif dan konstruktif dalam pembangunan daerah. Seluruh sub kegiatan ini didukung oleh fungsi monitoring, evaluasi, serta penyajian data dan informasi bidang politik dan kewaspadaan nasional yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan daerah secara tepat dan responsif.

Dengan pelaksanaan sub kegiatan tersebut, Bakesbangpol berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan demokratis, yang pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Secara langsung, kontribusi sub kegiatan Bakesbangpol mendukung prioritas RPJMD, khususnya dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan, meningkatkan kualitas demokrasi, memperkuat kerukunan masyarakat, serta membangun partisipasi publik dalam pembangunan. Hal ini menjadikan peran Bakesbangpol strategis sebagai penopang utama tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.4 berikut ini :

TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
1.	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
			8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
			8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
2.	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
3.	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan daerah	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
4.	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, agama dan budaya	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
5.	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial, budaya, agama dan ekonomi	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kebijakan umum adalah arah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, yang dirumuskan berdasarkan arahan strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJMD perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi melalui Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra yaitu Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Gangguan/Stabilitas Kehidupan Masyarakat Yang terselesaikan. Kebijakan umum daerah mendorong maju dan berkembangnya lembaga agama, lembaga pendidikan keagamaan dan sosial budaya dengan mengajak serta tokoh agama dan budaya dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang merincikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 disusun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5
TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029
MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RENSTRA		Target Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA				Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
			Realisasi 2024	Proyeksi 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IKU Eselon II									
1	Persentase gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU Eselon III									
1	Nilai Komponen Perencanaan	Nilai	22,50	24	24,25	24,25	25	25	25
2	Nilai Komponen Pengukuran	Nilai	22,50	24	24	24,25	24	24	24
3	Nilai Komponen Pelaporan	Nilai	12	12	12	12	12	12	12
4	Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai	20	20	20	20	20	20	20
5	Hasil survei pelayanan kesekretariatan	Nilai	87,34	90	90	90	90	90	90
6	Persentase partisipasi pelajar dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara dan pengembangan wawasan kebangsaan	%	15,39%	17%	20%	22%	23%	25%	25%
7	Indeks Ketahanan Diri Remaja	Nilai	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53
8	Persentase hasil rekomendasi koordinasi penanganan konflik umat beragama oleh FKUB yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Ormas yang berkontribusi dalam Pembangunan Daerah	%	93,63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	77,60%	-	-	-	-	78%	-
12	Persentase parpol yang aktif berkontribusi dalam pendidikan politik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase potensi konflik sosial, budaya, agama dan ekonomi yang tertangani sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam periode perencanaan tahun 2025–2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan IKK perangkat daerah. Namun demikian, untuk menjamin akuntabilitas dan pencapaian sasaran strategis, Bakesbangpol tetap menetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD) yang relevan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur kontribusi Bakesbangpol terhadap prioritas pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025–2029, penetapan target kinerja melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dimaksudkan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Namun demikian, untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tidak terdapat penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Walaupun tidak memiliki IKK, Bakesbangpol tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, sebagai alternatif ukuran kinerja digunakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD) yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol. IKPD tersebut mencerminkan capaian yang diharapkan dari program dan kegiatan, serta menjadi dasar evaluasi keberhasilan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan Bakesbangpol antara lain meliputi:

1. Tingkat fasilitasi penyelesaian potensi konflik sosial.
2. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik.
3. Indeks kerukunan umat beragama di daerah.
4. Jumlah organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan dibina.
5. Jumlah kegiatan penguatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan.

Dengan penetapan indikator tersebut, diharapkan Bakesbangpol tetap dapat

menunjukkan kontribusi nyata dalam menciptakan stabilitas politik, memperkuat ketahanan sosial, serta menjaga kondusivitas daerah sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025–2029

BAB V

P E N U T U P

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 118 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai sub system dalam Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah kabupaten
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dengan tujuan untuk memantapkan tata kelola Pemerintahan yang inovatif dan dinamis.

Dengan posisi yang strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tersebut diperlukan sistem yang terpadu dan berkelanjutan melalui penyusunan perencanaan strategis dalam menuangkan visi, misi, tujuan, program dan sasaran. Semoga rencana strategis ini mampu sebagai pedoman bagi tingkat manajemen dan Staf dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dengan menyesuaikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis maka disusunlah Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 11 September 2025
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut,



Sambang Kusudarisman, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680818 199010 1 003

LAMPIRAN



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/880-KUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025 - 2029

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLRI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dengan

susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terkait oleh ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :100.3.3.2/ 880-KUM/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025 - 2029

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag Program dan Anggaran	Sekretaris
4.	Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota
5.	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
6.	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kasubbag Keuangan	Anggota
10.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
11.	Jabatan Fungsional Tertentu	Anggota
12.	Penata Layanan Operasional	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

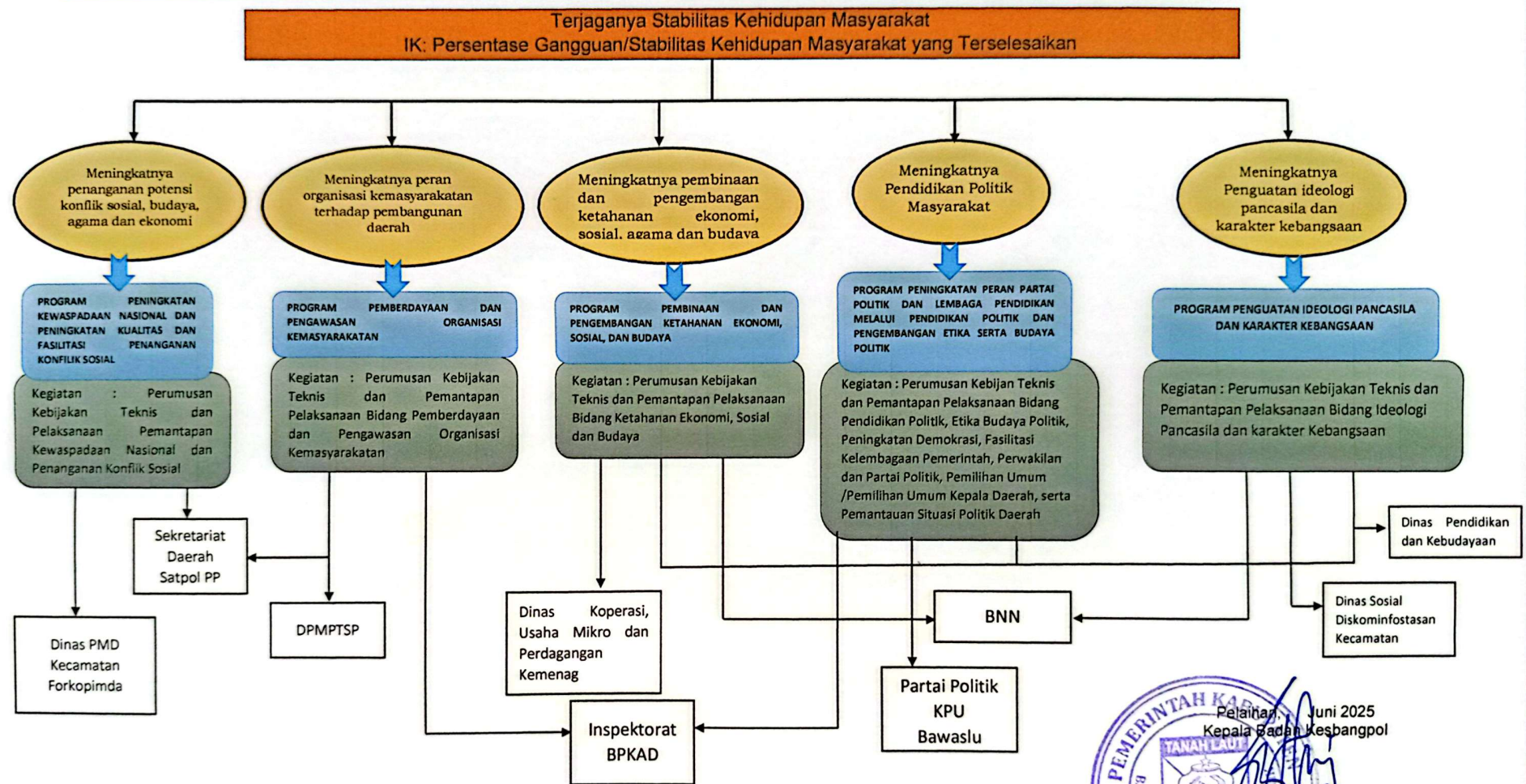
H. RAHMAT TRIANTO

ALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

CROSSCUTTING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025



Pelatihan, Juni 2025
Kepala Badan Kesbangpol

MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
Pemula Tk.I (IV/b)
NIP. 19790629 200003 1 004

